

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101 14 – 101 34 Bujur Timur dan 0 25 – 0 45 Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 (7 September 1987) daerah Kota Pekanbaru di perluas dari 62,96 km menjadi 446,50 km, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan. Namun dari hasil pengukuran atau pematokan dilapangan oleh Badan Pertahanan Nasional Tingkat I Riau, maka ditetapkan luas kota Pekanbaru adalah 632,26 Km.

Secara umum kota pekanbaru berbatasan dengan daerah - daerah berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawann
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.2 Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru merupakan salah satu unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah, dengan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi yang menjadi kewenangan dinas sebagaimana dijabarkan dibawah ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4.3 Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Setelah disahkannya undang-undang No.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, sebagian kewenangan pemerintah dilaksanakan oleh daerah. Bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kantor Departemen Tenaga Kerja Tingkat II Kotamadya Pekanbaru diubah menjadi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang tenaga kerja. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru dari mulai diberlakukan otonomi daerah sampai sekarang yaitu :

- a. Drs. Sarbaini Sulaiman
- b. Drs. Amir Husin
- c. Drs. Darius,M.Pd (2006-2008)
- d. Ikhwan Nasution,SE (2008- 2010)
- e. Drs. Pria Budi (juni 2010 s/d April 2014)
- f. Ir. Johnny S,MT (April 2014 s/d sekarang)

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru beralamat di Jl.Samarinda No.29 Tangkerang Utara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

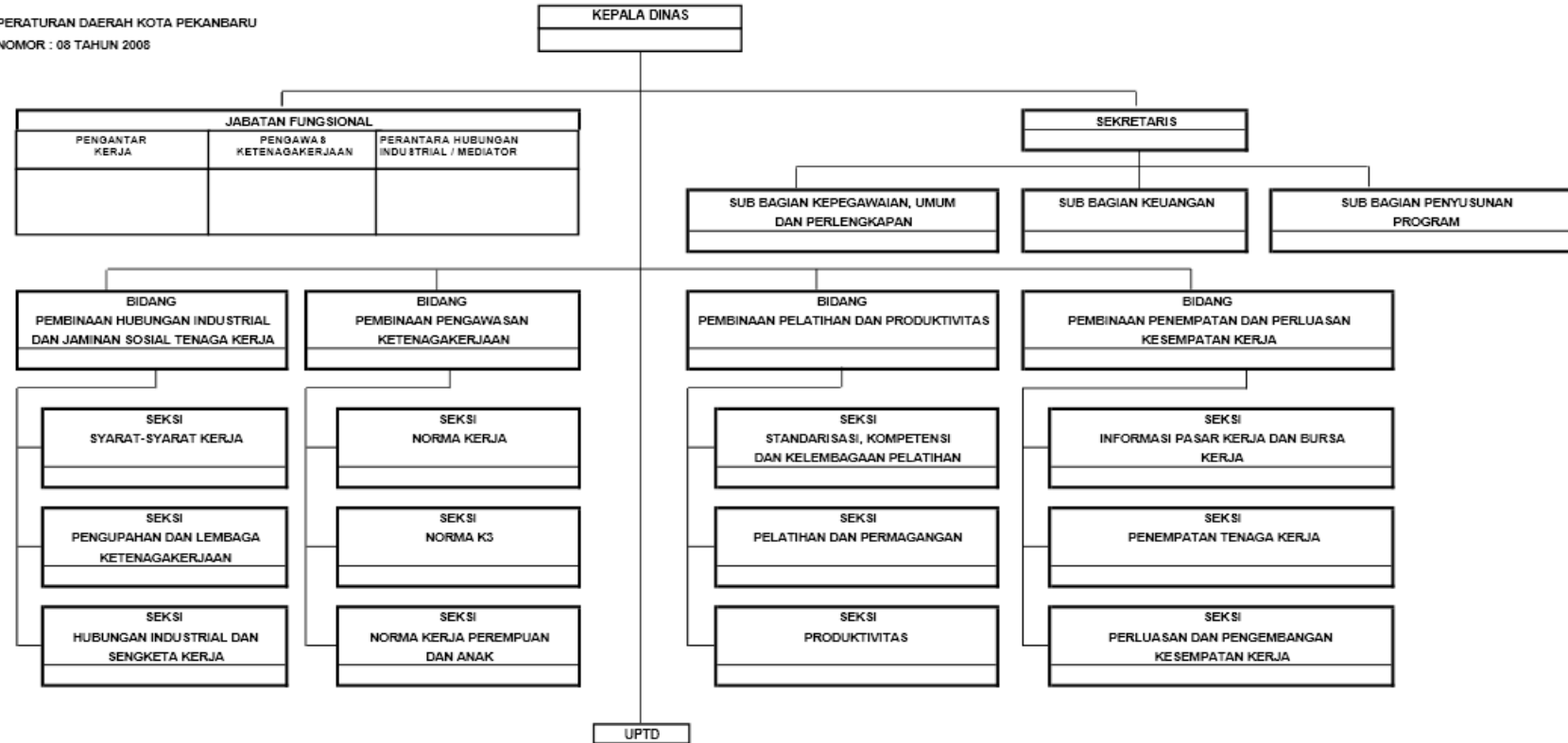
Struktur organisasi merupakan suatu sistem pembagian tanggung jawab, wewenang serta penetapan hubungan serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dan sasarranini hendaknya di capai semaksimal mungkin dengan menggunakan potensi – potensi yang dimiliki walaupun potensi tersebut terbatas.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2008, struktur organisasi organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah seperti gambar berikut :





PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 08 TAHUN 2008



Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru adalah “ Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dibidang Tenaga Kerja”.

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 17 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

4.5.1 Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Kebijakan Teknis dalam Bidang Tenaga Kerja
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang tenaga kerja
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja
- e. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkungan tugasnya
- f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam pelayanannya berkaitan dengan kelompok sasaran pembangunan ketenagakerjaan. Masing-masing bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru mempunyai peranannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.5.2 Sekretariat Dinas Tenaga Kerja

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas
- b. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas
- c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian – sub bagian
- d. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas
- e. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor

4.5.3 Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek

- a. Mengkoordinasikan serta merumuskan rencana dan menyusun program kerja sub bidang
- b. Mengkoordinasikan, merumuskan, kegiatan syarat – syarat kerja, pengupahan, lembaga ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan sengketa kerja (Perselisihan Hubungan Industrial)
- c. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- d. Melayani dan menanggapi keluhan masyarakat tenaga kerja dalam masalah syarat-syarat kerja, pengupahan, lembaga ketenagakerjaan, jamsostek dan perselisihan hubungan industrial dan memberikan saran

sebagai pertimbangan bagi kepala dinas dalam penetapan kebijakan dan perumusan pengambilan keputusan

4.5.4 Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

- a. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan program sub dinas
- b. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma kerja, norma keselamatan, dan kesehatan kerja (K3) dan norma kerja Perempuan dan anak
- c. Melakukan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan norma kerja Perempuan dan yang bersifat strategis
- d. Merumuskan penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan norma kerja perempuan dan anak
- e. Merumuskan dan melaksanakan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan terhadap terjadinya kecelakaan kerja
- f. Merumuskan dan melaksanakan pemeriksaan dan penelitian penetapan tunjangan kecelakaan kerja
- g. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan dan pemeriksaan laporan pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dan norma kerja perempuan dan anak atas kunjungan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan berita acara pemeriksaan proses penyidikan PNS ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.5 Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

- a. Mengkoordinasikan dan membina dan merumuskan penyusunan rencana dan program kegiatan pelatihan dan produktivitas
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan pengolahan serta penyediaan data pelatihan dan permagangan, produktivitas tenaga kerja dan standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan
- c. Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan serta menyediakan infrastruktur pelatihan, permagangan, produktivitas, standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan
- d. Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya pelatihan, permagangan, produktivitas, standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta melaksanakan serta penguatan sistem dan metode pelatihan, permagangan, produktivitas standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan
- f. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan serta melaksanakan penguatan sistem pendanaan pelatihan, permagangan, produktivitas, standarisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan
- g. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan revalidasi kinerja kelembagaan pelatihan dan produktivitas
- h. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan perizinan dan pembinaan lembaga pelatihan kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mengoordinasikan, membina dan merumuskan perizinan program permagangan bagi lembaga pelatihan kerja
- j. Mengkoordinasikan, membina asosiasi lembaga pelatihan dalam bentuk jejaring kerjasama

4.5.6 Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

- a. Mengkoordinasikan dan membina dan merumuskan penyusunan rencana dan program kerja sub bidang
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengumpulan dan pengolahan serta penyediaan data informasi Pasar kerja dan Bursa Kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan bimbingan dan penyuluhan jabatan bagi tenaga kerja
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan instansi terkait, perusahaan swasta/BUMN/BUMD, organisasi pengusaha dan serikat pekerja di daerah agar terjalin kerjasama yang baik sesuai dengan bidang tugasnya
- e. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja

4.6 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Susunan Kepegawaian Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berjumlah 48 (empat puluh delapan orang) laki-laki 31 (tiga puluh satu) orang dan perempuan 17 (tujuh belas) orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan struktur organisasi Perangkat Daerah, dari jumlah pegawai diatas terdiri dari satu pejabat eselon II/a, eselon III/a ada satu orang, jabatan eselon III/b jumlahnya 4 orang, dan yang menduduki jabatan eselon IV/a berjumlah 15 orang dan pejabat fungsional 4 orang, sebagaimana disusun pada table 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Komposisi Kepengurusan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	II/a	1 Orang
2	Sekretaris Dinas	III/a	1 Orang
3	Kepala Bidang	III/b	4 Orang
4	Kepala Sub Bagain / Kepala Seksi	IV/a	15 Orang
5	Fungsional		
	- Pengantar kerja		1 Orang
	- Pengawas		1 Orang
	- Mediator		2 Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2019

Potensi pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru didominasi oleh adalah golongan III, jumlahnya mencapai 29 orang atau 60,4 % dari jumlah seluruh pegawai, yang disajikan dalam bentuk tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	13 Orang
2	Golongan III	29 Orang
3	Golongan II	5 Orang
4	Golongan I	1 Orang
	Jumlah	48 Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2019

Jumlah pegawai disusun berdasarkan pendidikan, maka dapat digambarkan dalam tabel 4.3 dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Kota Pekanbaru

Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah terwujudnya kualitas kemandirian dan perlindungan tenaga kerja menuju masyarakat sejahtera.

Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan tertib administrasi ketenagakerjaan untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan prima
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil, produktif, dan mandiri dalam menciptakan lapangan kerja serta dapat memenuhi kebutuhan kerja dan dunia kerja
- d. Meningkatkan pembinaan dan penempatan dan perluasan kesempatan kerja
- e. Meningkatkan pembinaan ketenagakerjaan dan penyelesaian hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sehingga tercipta keadaan masyarakat industri yang kondusif
- f. Meningkatkan perlindungan, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum